

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA DATA  
KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020- 2021  
(STUDI EMPIRIS DI KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH)

**Oleh:**

Taufan Redina Adi Purnama

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta  
Jawa Tengah

<sup>1</sup> E-mail: taufan@surakarta.go.id

***Abstract***

*The purpose of carrying out the research which is expected to be achieved is to analyze the implementation of Mayor Regulation Number 13 of 2019 concerning Regional Poverty Data Governance.*

*The research method used in this research is qualitative research. The purpose of this qualitative research is to analyze the implementation of mayoral regulation number 13 of 2019. This research is in the process of using data collection techniques in the form of observations and interviews with objects that will be used as the basis of research to examine the phenomenon of the existence of non-poor citizens entering the poverty database and the phenomenon of people claiming to be poor to get assistance, therefore the researcher uses this type of qualitative research.*

*The results of the research conducted are that the governance of regional poverty data in accordance with Mayor Regulation No. 13 of 2019 has been carried out effectively according to the plan of the Surakarta City Government. through the data that has been presented based on Edward III's theory seen from 4 indicators: 1. Communication: in the implementation of the policy, it has been carried out well and clearly for all members of poverty data management, most of the communication is done with the whatups group so that problems can be quickly resolved related to technical and policy issues. 2. Resource: In its implementation, there is already a division of tasks and responsibilities for each task and function of the poverty data management team as well as utilizing technology in managing regional poverty data. 3. Disposition: governance of poverty data and has been regulated in Mayor Regulation No. 4 of 2018. 4. Bureaucratic structure : the existence of Standard Operating Procedure and main functions in carrying out the duties and responsibilities of the team. So that the realization and plan achievements prove that the activities of the poverty data management team are carried out according to their duties and functions and achieve the predetermined targets. However, there is something that is less trusted, namely related to : 1. Communication: Communication that must be strengthened by the strategy of delivering information or outreach to the public about checking the status of poverty data through conventional methods or with social media, with this method the public will know the status in the poverty database. 2. Bureaucratic structure : Bureaucratic structure in the absence of Standard Operating Procedure that*

*regulate the movement of the poor so that it is confusing in data collection, which results in aid not being targeted.*

***Keywords: communication, resources, disposition, organisation structures***

---

## **Pendahuluan**

Kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah dan baik di negara manapun. Kondisi ini membuat target penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dalam ***Millenium Development Goals (MDGs)***. Pendanaan untuk kegiatan pengentasan kemiskinan telah disediakan sangat banyak. Kondisi ini diperkuat dengan jumlah data penduduk miskin Kota Surakarta pada setiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Persentase angka kemiskinan daerah setiap tahun juga mengalami penurunan, menurut data dalam Surakarta dalam Angka Tahun 2020 data persentase penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2012 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, pada tahun 2012 sebesar 12%, tahun 2013 sebesar 11,74%, tahun 2014 sebesar 10,95%, tahun 2015 sebesar 10,89%, tahun 2016 sebesar 10,88%, tahun 2017 sebesar 10,65%, tahun 2018 sebesar 9,08% dan tahun 2019 sebesar 8,70%.

Namun kondisi seperti ini belum tercermin dilapangan karena warga kota Surakarta lebih suka menjadi status miskin karena akan selalu mendapatkan bantuan. Seperti yang disampaikan Walikota Surakarta Bapak F.X. Hadi Rudyatmo Walikota Kota Surakarta Periode 2016-2021 bahwa kendala utama Pemerintah Kota Surakarta dalam mengentaskan kemiskinan

adalah penyakit masyarakat, pada dasarnya warga lebih senang mendapatkan status miskin karena mendapat banyak bantuan dari pemerintah (Sumber: Berita pada portal RRI pada tanggal 03 Februari 2020). Fakta dilapangan diperkuat dengan kondisi masih terdapat kondisi rumah layak tetapi terdaftar pada data Keluarga Miskin. Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengelola data kemiskinan dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah (Surakarta, 2019) ditunjukkan dalam perwali tersebut mengatur bahwa Tata Kelola Data Kemiskinan Kota Surakarta dikelola dengan mengklasifikasikan data kemiskinan menjadi 4 kelas sebagai yaitu Data Warga Miskin, Data Warga Miskin Bukan Penduduk Daerah, Data Warga Rentan Sosial, Data Warga Rentan Sosial Bukan Penduduk Daerah.

Suwardi (2022) kerangka kerja manajemen evaluasi kebijakan public mengikuti pola sistem. Pola sistem manajemen evaluasi kebijakan terdiri dari komponen masukan (*input*), proses konversi (*process conversion*), luaran (*output*), dan dampak (*outcome*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Brinkerhoff, R.O., et.al, (1983) Manajemen evaluasi kebijakan dilakukan pada tiga jenis pendekatan evaluasi, yaitu (1) goal-based evaluation, (2) process-based evaluation, dan (3) outcome-based evaluation. Proses base evaluation termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi komponen input dalam proses untuk menghasilkan output dari kebijakan public.

Implementasi kebijakan disumbangkan dari pemikiran George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Hom dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dengan *A Frameworkfor Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah di Kota Surakarta, yang meneliti dari sisi kinerja komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi dari pelaksanaan tata kelola data kemiskinan tersebut, maka dari itu kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tahapan yang dimulai dari adanya identifikasi kebutuhan variabel dalam penelitian

ini dilakukan menggunakan konsep Edward III, karena variabel pokok yang digunakan sebagai tolak ukur, sebagai berikut:

- a. Variabel Komunikasi
- b. Variabel Sumber Daya
- c. Variabel Disposisi
- d. Variabel Struktur Organisasi

Secara garis besar kebutuhan variabel dalam penelitian tersebut akan dianalisis secara keseluruhan melalui teknik analisis penelitian untuk dapat mengetahui dari kinerja implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah di Kota Surakarta.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dalam prosesnya menggunakan Teknik Pengumpulan data dalam bentuk Observasi dan Wawancara terhadap objek yang akan dijadikan dasar penelitian untuk meneliti terkait fenomena masih adanya warga tidak miskin yang masuk database kemiskinan serta fenomena ada warga yang mengaku miskin untuk mendapatkan bantuan, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Strauss & Juliet Corbin, 2013) adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya meskipun begitu sebagian datanya dapat dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisisnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif menurut beberapa pengalaman beberapa peneliti dapat digunakan untuk mengungkapkan dan

memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui, disamping itu pendekatan kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena. Penelitian implementasi kebijakan publik berlokasi di 5 (lima) Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Sosial Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta, Kecamatan Jebres dan Kelurahan Nusukan.

Penentuan Informan ialah suatu teknik untuk menentukan dan memperoleh informasi dari unit analisis penelitian. Unit analisis yang ditentukan dalam penelitian ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan Peneliti. Pemilihan informan yang dilakukan Peneliti dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam penelitian, penentuan informan ini didasarkan Keputusan Walikota Pemerintah Kota Surakarta Nomor. 400.05/58.2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Surakarta Tahun 2021-2023.

Ada beberapa alasan peneliti dalam melakukan pemilihan informan diatas, yaitu:

- a. Pemilihan ketua kelompok kerja (pokja) data yaitu kepala dinas social kota surakarta karena sebagai leading tata Kelola data kemiskinan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi secara menyeluruh.
- b. Pemilihan anggota kelompok kerja (pokja) data yaitu kepala bidang pemberdayaan fakir miskin dinas sosial kota Surakarta karena sebagai kepala

bidang yang langsung membidangi tata Kelola data miskin.

- c. Pemilihan anggota kelompok kerja (pokja) data yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta karena sebagai kepala bidang yang langsung membidangi tata Kelola data miskin.
- d. Pemilihan anggota kelompok kerja (pokja) data yaitu Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta karena sebagai kepala bidang yang membidangi e-government.
- e. Pemilihan anggota kelompok kerja (pokja) data yaitu Camat Jebres karena merupakan camat yang masa jabatannya paling lama dibandingkan dengan camat di wilayah lainnya dan dengan wilayah terbesar serta jumlah warga miskin terbanyak no 2 se-Surakarta.
- f. Pemilihan anggota kelompok kerja (pokja) data yaitu Lurah Nusukan karena karena merupakan lurah yang masa jabatannya paling lama dibandingkan dengan lurah di wilayah lainnya dan dengan wilayah terbesar serta jumlah warga miskin terbanyak no 2 se-Surakarta. Penelitian implementasi kebijakan publik menggunakan dua jenis data yaitu:

**a. Data Primer**

Jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan langsung pada unit analisis

penelitian tertentu seperti informan Dinas Sosial, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta dan Kecamatan.

**b. Data Sekunder**

Jenis data yang laporan tahunan data kemiskinan dan Surakarta dalam angka tahun 2020.

Sugiyono (2012:241) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya sehingga dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Menurut (Matthew B. Miles & A Michael Huberman, 2009) di dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- a. Kondensasi Data
- b. Penyajian Data
- c. Kesimpulan

**Pembahasan**

Kota Surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan letak secara geografis berada antara 110°45'15" - 110°45'35" BT dan 7°36'00" - 7°56'00" LS dengan luas wilayah 44,04 km<sup>2</sup>. dengan administrasi batas wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- b. Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- c. Batas Timur : Kabupaten Karanganyar
- d. Batas Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 604 RW dengan jumlah RT sebanyak 2.714 dan jumlah KK sebanyak 169.772 jiwa pada tahun 2015. Jumlah RW terbesar terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 176 dengan jumlah RT sebanyak 877. Jumlah RW dan RT yang paling kecil adalah Kecamatan Serengan yaitu hanya sebesar 72 dan 312.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota surakarta dibentuk untuk melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota surakarta ini yaitu : pengendalian pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah, pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan perangkat daerah meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi, penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodic, pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan, pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan, dan penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada walikota dan TKPK Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2020 bahwa Jumlah Anggaran dan terdapat rencana serta

realisasi yang disajikan per kecamatan, pada Kecamatan Laweyan rencana jumlah anggaran bantuan yaitu 2.352.200 kepala keluarga dan terealisasi 2.352.200 Kecamatan Serengan rencana jumlah anggaran bantuan yaitu 2.042.000 kepala keluarga dan terealisasi 2.042.000. Kecamatan Pasar Kliwon rencana jumlah anggaran bantuan yaitu 1.021.000 kepala keluarga dan terealisasi 1.021.000. Kecamatan Jebres jumlah anggaran bantuan yaitu 1.227.800 kepala keluarga dan terealisasi 1.227.800. Terakhir pada kecamatan Banjarsari rencana jumlah anggaran bantuan yaitu 663.400 kepala keluarga dan terealisasi 663.400 sehingga pada Kota Surakarta rencana jumlah anggaran bantuan yaitu 7.306.400 kepala keluarga dan terealisasi 7.306.400 sehingga rencana yang terealisasi sebanyak 100%.

**Tabel 1. Jumlah Penerima Bantuan Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan Menurut Kecamatan (Kepala Keluarga)	
	Rencana	Realisasi
Laweyan	11.761	11.761
Serengan	10.21	10.21
Pasar Kliwon	5.105	5.105
Jebres	6.139	6.139
Banjarsari	3.317	3.317
<b>Kota Surakarta</b>	<b>36.532</b>	<b>36.532</b>

Sumber: Pengolahan Data Dinas Sosial, 2020

Dari data yang didapatkan pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa terdapat tabel Jumlah penerima bantuan dan terdapat rencana serta realisasi yang disajikan per kecamatan, pada Kecamatan Laweyan rencana kepala keluarga

penerima bantuan yaitu 11.761 kepala keluarga dan terealisasi 11.761 sehingga rencana pada kecamatan laweyan terealisasi sebanyak 100%. Selanjutnya pada Kecamatan Serengan rencana kepala keluarga penerima bantuan yaitu

10.210 kepala keluarga dan terealisasi 10.210 sehingga rencana pada Kecamatan Laweyan terealisasi sebanyak 100%. Ketiga pada kecamatan Pasar Kliwon rencana kepala keluarga penerima bantuan yaitu 5.105 kepala keluarga dan terealisasi 5.105 sehingga rencana pada kecamatan laweyan terealisasi sebanyak 100%. Keempat pada Kecamatan Jebres rencana kepala keluarga penerima bantuan yaitu 6.139 kepala keluarga dan terealisasi 6.139 sehingga rencana pada Kecamatan Laweyan terealisasi sebanyak 100%. Terakhir pada Kecamatan Banjarsari rencana kepala keluarga penerima bantuan yaitu 3.317 kepala keluarga dan terealisasi 3.317 sehingga rencana pada kecamatan laweyan terealisasi sebanyak 100%. Secara akumulasi pada Kota Surakarta rencana kepala keluarga penerima bantuan yaitu 36.532 kepala keluarga dan terealisasi 36.532 sehingga rencana yang terealisasi sebanyak 100%.

Dari Hasil data diatas dapat dilihat bahwa pembentukan Tim Pengelolaan Kemiskinan Kota Surakarta(TKPK) menjadi salah satu indikator dalam pencapaian dan penanggulangan kemiskinan di Surakarta, terbukti tugas pokok dan fungsi tim tata Kelola data kemiskinan dengan tercapainya rencana anggaran serta rencana penerimaan bantuan pada tahun 2020. Adapun hasil penelitian Kinerja TKPK yang didasarkan pada Perwali No.13 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah yaitu diukur dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III dengan indikator :

1. **Komunikasi** merupakan salah satu bahasan tinjauan pada penelitian ini. Poin mendasar pada komunikasi di penelitian ini terdapat tiga poin yaitu: Kemampuan memahami, Transmisi dan kejelasan, dan Cara penyampaian pesan dan media penyampaian.
  - a. Kemampuan Memahami  
Tim teknis yang terlibat dalam Tata Kelola Data Kemiskinan sudah mengetahui dan memahami fungsi dan tugas masing-masing OPD yang terlibat, hal ini dapat telah disampaikan oleh kepala perangkat daerah terkait sejauh mana peran perangkat daerah, proses komunikasi dari pimpinan sebagai pengembian tugas untuk dikomunikasikan ke jajarannya
  - b. Transmisi dan Kejelasan  
Point kedua dari wawancara yaitu mengenai Transmisi dan Kejelasan dari semua hasil wawancara tim teknis yang terlibat dalam tata Kelola data kemiskinan sudah mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan kepada anggota pokja data maupun dari tim teknis yang terdapat di OPD
  - c. Cara Penyampaian pesan dan Media  
Poin ketiga dari wawancara tim teknik dalam menyampaikan permasalahan atau melakukan koordinasi dilakukan melalui WAG yang dibentuk untuk

- mempermudah komunikasi dalam tata kelola data kemiskinan.
2. **Sumber Daya** merupakan salah satu bahasan tinjauan dalam penelitian ini. Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat berupa staf/ tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas. terdapat tiga poin variabel yaitu:
    - a. **Tingkat Kewenangan**  
Tim teknis saat ini belum menemui kendala dalam kewenangan tata kelola data kemiskinan
    - b. **Sumber Daya Manusia**  
Sumberdaya atau kualifikasi tim teknis saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan dari kualifikasi pendidikan sebagai contoh
    - c. **Ketersediaan Fasilitas.**  
Pengelolaan tata kelola data kemiskinan yang dilakukan oleh tim teknik saat ini menggunakan fasilitas yang memadai namun demikian perlu ditingkatkan dimasa mendatang karena pertumbuhan laju penduduk di Kota Surakarta meningkat.
  3. **Disposisi** dapat diartikan sebagai perintah atau instruksi dari atasan/ pimpinan kepada bawahan, atau dari jabatan eselon yang lebih tinggi ke jabatan eselon bawahnya. Disposisi yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan
    - a. **Kesadaran tugas**  
Tim teknis yang menangani tata kelola data kemiskinan menyadari dalam pekerjaan kerap tidak sesuai dengan perencanaan dengan demikian tugas utama maupun tugas tambahan dikelola sedemikian agar setiap instruksi yang diberikan oleh atasan dapat diterapkan.
    - b. **Keselaran pandangan**  
Komunikasi yang telah dilakukan dengan baik dari Pimpinan dan jajarannya termasuk pada Tim teknis yang menangani tata kelola data kemiskinan berdampak bahwa pihak yang terlibat telah memiliki kepekaan yang sama dengan demikian proses penerapan kebijakan publik dapat dilakukan dengan baik.
    - c. **Pemenuhan insentif.**  
Insentif saat ini belum ada, karena pada dasarnya ini merupakan tugas rutin yang merupakan tanggung jawab perangkat daerah dalam mencapai keberhasilan penurunan angka kemiskinan.
  4. **Birokrasi** didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Struktur birokrasi yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan :
    - a. **kesesuaian pembagian tugas kerja**  
Tim teknis yang bekerja pada masing-masing perangkat daerah telah memiliki tugas dan kewenangan sesuai

dengan tugas pokok fungsinya.

b. ketersediaan SOP

Tim teknik yang bekerja pada masing-masing perangkat daerah telah memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah.

c. kejelasan garis komando dalam tata kelola data kemiskinan daerah Kota Surakarta di setiap kelompok kerja

Tim teknik yang bekerja pada masing-masing perangkat daerah telah memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan tugas pokok fungsinya dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dan melaporkan pelaksanaan tugas tersebut sesuai dengan garis komando pada masing-masing perangkat daerah.

Dari hasil yang didapatkan dalam proses penelitian dengan narasumber didapatkan bahwa pada poin komunikasi khususnya dalam pelaksanaan kebijakan peraturan walikota surakarta nomor 13 tahun 2019 tentang tata kelola data kemiskinan daerah sudah dapat memahami tugas dan wewenang dari masing masing OPD dan tim yang terlibat, semua tim juga sudah mempunyai dan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diberikan kepada anggota pokja data dan pelaksanaan tugas dari kelompok kerja data masing-masing,

kesalahpahaman dalam pelaksanaan sudah sangat bisa di minimalisir sehingga tidak ada nya lagi kesalahpahaman yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola data kemiskinan.

Komunikasi yang dilaksanakan melalui tatap muka tetapi karena adanya beberapa peraturan dalam pembatasan tatap muka sehingga para tim tidak bisa terlalu intens dalam pelaksanaan rapat atau pertemuan sehingga banyaknya komunikasi yang sekarang melalui *Whatsapp Group*, *Whatsapp* pribadi, dan Telepon. Media ini sudah dianggap cukup dan memenuhi unsur komunikasi dalam tata kelola data kemiskinan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan komunikasi didalam tata kelola data kemiskinan daerah ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa di harapkan oleh tim tata kelola data kemiskinan daerah. Selain itu diperkuat dengan informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang cek status Data Kemiskinan melalui metode konvensional ataupun dengan media sosial,dengan metode ini masyarakat akan mengetahui dia masuk dalam database kemiskinan atau tidak.

Target dari pelaksanaan data kemiskinan daerah setiap tahun nya juga sudah terpenuhi dengan ada nya tugas kebijakan yang jelas dari pemerintah kota Surakarta dalam menunjang pelaksanaan tata kelola data kemiskinan daerah.

Sumber daya adalah penyediaan suatu hal pada suatu negara, organisasi, atau individu yang dapat berupa staf/ tenaga kerja, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dari hasil yang didapatkan dalam proses penelitian dengan narasumber

didapatkan bahwa pada poin sumber daya ini masih ada nya beberapa hal yang menghambat pelaksanaan tata kelola data kemiskinan daerah khususnya terkait dengan birokrasi ASN yang ada dalam pemerintahan kota Surakarta, yaitu dalam pelaksanaan tata kelola data kemiskinan daerah ini khususnya yang berbasis IT untuk sumber daya manusia yang ditempatkan bahkan tidak mempunyai background Pendidikan atau keahlian yang sama, sehingga selama ini dari pihak tim tata kelola data kemiskinan daerah melakukan improvisasi berupa pelatihan secara personal agar nantinya tugas dilapangan yang terkait tidak akan terkendala terlalu banyak dan masih bisa melaksanakan kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab dari tim tata kelola data kemiskinan daerah.

Pelaksanaan tata kelola data kemiskinan daerah dianggap masih belum proporsional dalam pembagian tugas yang berbasis wilayah, dikarenakan perbedaan luas wilayah dan jumlah penanganan pada setiap wilayah kecamatan tetapi sumber daya manusia yang di tempatkan pada posisi tersebut masih dengan jumlah yang sama, sehingga terdapat ketimpangan jumlah tugas antara sumberdaya manusia yang ditugaskan pada wilayah yang lebih luas dan lebih banyak memiliki data kemiskinan, tetapi hal ini pun sudah menjadi tanggung jawab bagi tim tata kelola data kemiskinan daerah untuk melakukan improvisasi dalam menyamaratakan tugas bagi setiap tim tata kelola data kemiskinan daerah. Disposisi dapat diartikan sebagai pernyataan evaluatif seseorang terhadap suatu keadaan

yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, tindakan, serta terpengaruh oleh pandangan kelompok, pergantian personil, serta insentif.

Dari hasil yang didapatkan dalam proses penelitian dengan narasumber didapatkan bahwa pada poin disposisi ini sudah ada nya SOP dan tupoksi dalam melaksanakan tata kelola data kemiskinan daerah, SOP dan tupoksi ini membantu dalam melaksanakan kegiatan serta tugas dan tanggung jawab dari masing masing tim, tetapi khusus untuk tupoksi terdapat tugas dan tanggung jawab yang berada diluar tupoksi tetapi tugas dan tanggung jawab tersebut masih berkaitan erat dengan apa yang dilaksanakan, sehingga walaupun tugas dan tanggung jawab tersebut diluar pada SOP dan tupoksi tertulis tetap dilaksanakan dengan baik oleh tim tata kelola data kemiskinan daerah.

Perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan tupoksi antar tim tata kelola data kemiskinan daerah sudah tidak ada atau sudah memiliki satu pemahaman. Tetapi ada beberapa perbedaan pemahaman antara tim lapangan dan masyarakat tetapi hal tersebut bisa di selesaikan dengan memberikan informasi terkait tata kelola data kemiskinan daerah dari petugas lapangan kepada masyarakat. Perbedaan pemahaman ini biasanya terletak pada saat pengajuan bantuan social, masyarakat menganggap bahwa pemerintah masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan bantuan dari masyarakat padahal pada tim pengelolaan tata kelola data kemiskinan daerah hal tersebut dikarenakan memang masyarakat belum memenuhi kriteria dalam penerimaan bantuan sosial misalna,

sehingga hal tersebut sering menjadi permasalahan antara tim lapangan dan masyarakat umum.

Untuk tim Program tata kelola data kemiskinan daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terdapat pada tupoksi tim tata kelola data kemiskinan daerah tidak mendapatkan insentif tambahan kecuali tim lapangan yang diberikan insentif yang dihitung per rumah yang didatangi. Beberapa hal diatas sudah dianggap sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada terkait tata kelola data kemiskinan daerah.

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang meliputi pembagian pekerjaan (*division of work*), garis komando (*chain of command*), cakupan kendali (*span of control*), formalisasi aturan (*formalization of rules*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Dari hasil yang didapatkan dalam proses penelitian dengan narasumber didapatkan bahwa pada poin struktur birokrasi sudah ada nya SOP dan tupoksi dalam melaksanakan tata kelola data kemiskinan daerah, SOP dan tupoksi ini membantu dalam melaksanakan kegiatan serta tugas dan tanggung jawab dari masing masing tim, seluruh tim tata kelola data kemiskinan daerah sudah memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab tim masing-masing, sehingga kegiatan tata kelola data kemiskinan daerah sudah dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target yang di berikan oleh Pemerintah Kota Surakarta sehingga

pembagian tugas dan kewenangan yang ada di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah ) tidak menjadikan organisasi yang terkotak-kotak atau terfragmentasi tetapi saling bersinergi dan berkolaborasi antar satu dengan yang lain.

SOP terkait penduduk miskin yang pindah alamat domisili belum ada sehingga masih ada penduduk miskin yang sudah pindah luar kota, pindah kelurahan, pindah rusun sehingga menyulitkan dalam pemberian bantuan atau menjadikan bantuan tidak tepat sasaran.

### Penutup

Tata kelola data kemiskinan daerah sesuai dengan Peraturan Walikota No.13 Tahun 2019 sudah terlaksana secara efektif sesuai dengan rencana dari Pemerintah Kota Surakarta melalui data yang telah disajikan berdasarkan teori George C. Edward III yang dilihat dari 4 indikator yaitu:

- a. Komunikasi: dalam pelaksanaan kebijakan sudah dapat terlaksana dengan baik dan jelas untuk semua anggota tata kelola data kemiskinan, komunikasi yang dilakukan kebanyakan dengan grup whatups sehingga permasalahan bisa cepat terselesaikan terkait pemasalahan teknis dan kebijakan.
- b. Sumber daya: dalam pelaksanaannya sudah adanya pembagian tugas dan penanggung jawab dari masing masing tugas dan fungsi dari tim tata kelola data kemiskinan serta memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengelolaan data kemiskinan daerah.

- c. Disposisi: tim tata kelola data kemiskinan dalam melakukan disposisi sudah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Peraturan Walikota No.4 Tahun 2018 serta Peraturan Walikota No.13 Tahun 2019.
- d. Struktur birokrasi: sudah adanya SOP dan tupoksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tim.
- e. Sehingga capaian realisasi dan rencana membuktikan bahwa kegiatan dari tim tata kelola data kemiskinan terlaksana sesuai tugas dan fungsi dan mencapai sasaran yang telah di tentukan.

Namun demikian Perwali tersebut diatas memerlukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu Pembuatan SOP terkait penyampaian informasi kepada warga saat status data kemiskinan sudah di tetapkan, Pemanfaatkan media sosial, teknologi informasi dan pengumuman yang bersifat tradisional seperti papan pengumuman di Kelurahan, RT, RW sehingga warga bisa melakukan cek status kemiskinannya, dan bisa melakukan koreksi jika terjadi kesalahan, Pembuatan SOP terkait perpindahan penduduk miskin antar wilayah

#### **Daftar Pustaka**

Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

*Burhan Bungin. 2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta. Rajawali Pers*

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. 2020. *Kota Surakarta Dalam Angka 2020*. Surakarta. BPS Kota Surakarta.

Carl Van Horn dan Donal Van Meter. 1975. *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*. Yogyakarta.

Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd ed.)*. Gadjah Mada University Press Yogyakarta.

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy. Washington DC. Congressional Quarterly Press*.

Matthew B. Miles, & A Michael Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.

Strauss, A., & Juliet Corbin. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Suwardi, (2022) *Menejemen Evaluasi Kebijakan*. Dalam Ariyanto (editor) *Kebijakan Publik*. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatra Barat.

<https://globaleksekutifteknologi.co.id/kebijakan-publik/>